THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

REKOMENDASI THE INDONESIAN INSTITUTE UNTUK PERATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT YANG BERBASIS PEMENUHAN HAK

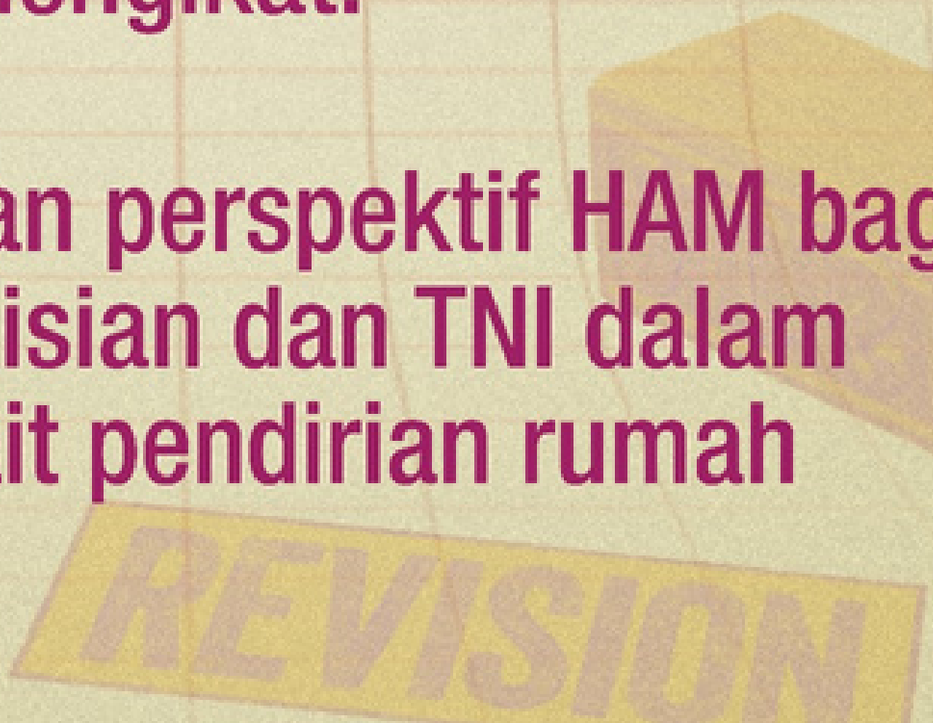
DALAM ASPEK KONTEN DAN KONTEKS KEBIJAKAN

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

1 Merevisi aturan persyaratan izin pendirian rumah ibadat yang diskriminatif dan multitafsir.

2 Membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif dengan hasil yang mengikat.

3 Meningkatkan perspektif HAM bagi aparat kepolisian dan TNI dalam konflik terkait pendirian rumah ibadat.

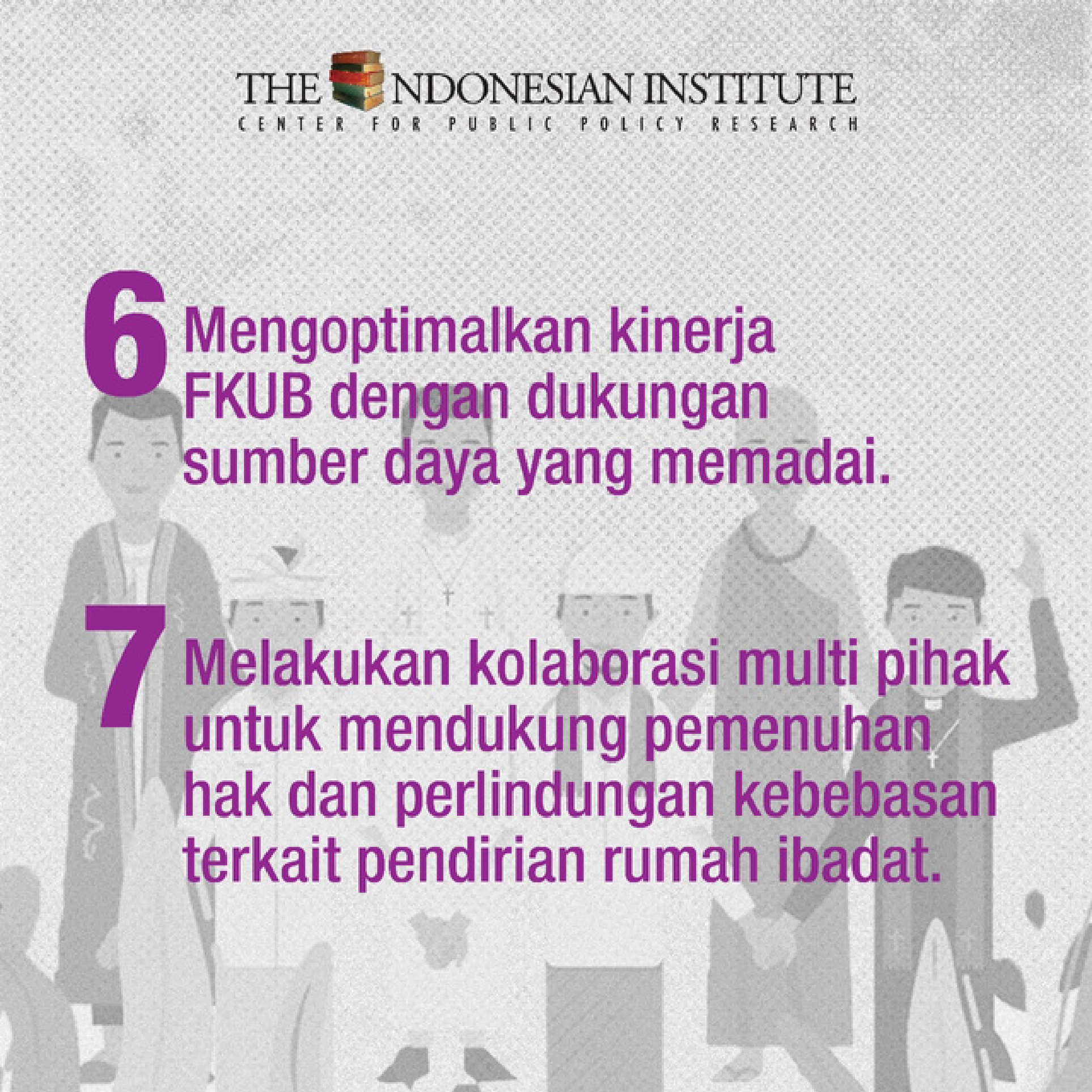


THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

4 Mendorong penafsiran dan pelaksanaan PBM yang kontekstual dan berbasis pemenuhan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

5 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberagaman, kerukunan, serta toleransi beragama dan berkeyakinan.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH



6 Mengoptimalkan kinerja FKUB dengan dukungan sumber daya yang memadai.

7 Melakukan kolaborasi multi pihak untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kebebasan terkait pendirian rumah ibadat.